BAB V

OUTPUT PENELITIAN

A. Ringkasan Eksekutif

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi peserta didik dan kelompok rentan sebagai upaya mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Program ini diselenggarakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis**.** Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Program MBG di Kota Makassar masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain pemanfaatan anggaran yang belum optimal, kualitas dan variasi menu makanan yang masih perlu ditingkatkan, serta pengawasan keamanan pangan yang belum maksimal. Permasalahan tersebut perlu segera mendapat perhatian mengingat Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional dengan dukungan anggaran yang besar serta berperan penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Apabila berbagai kendala tersebut tidak segera diatasi, efektivitas program dan manfaat yang diterima oleh peserta didik maupun kelompok rentan berpotensi tidak tercapai secara optimal.

Sebagai solusi, direkomendasikan tiga langkah strategis, yaitu optimalisasi pemanfaatan fasilitas pangan yang telah tersedia**,** peningkatan kualitas dan variasi menu makanan**,** serta penguatan pengawasan keamanan pangan**.** Pelaksanaan rekomendasi tersebut memerlukan peran Badan Gizi Nasional sebagai penanggung jawab utama, dengan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) sebagai

koordinator di daerah yang berkoordinasi dengan SPPG, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan fasilitas kesehatan untuk memastikan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis berjalan secara efektif, berkualitas, aman, dan berkelanjutan.

B. Pendahuluan

Masalah gizi pada peserta didik dan kelompok rentan, seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, masih menjadi tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menyelenggarakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Penyelenggaraan program ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis sebagai landasan dalam pelaksanaan program secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Komitmen terhadap penyelenggaraan Program MBG tercermin dalam APBN Tahun 2026 melalui alokasi anggaran sekitar Rp223 triliun kepada Badan Gizi Nasional yang bersumber dari anggaran pendidikan sebesar Rp769 triliun**,** sesuai amanat Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan alokasi sekurang-kurangnya 20% APBN untuk fungsi pendidikan. Besarnya alokasi tersebut menunjukkan bahwa MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang memperoleh dukungan anggaran yang signifikan. Di sisi lain, penggunaan sebagian anggaran pendidikan untuk Program MBG juga menimbulkan perhatian karena dinilai berpotensi mengurangi alokasi bagi peningkatan mutu pendidikan, seperti penyediaan

sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kompetensi guru, serta pengembangan layanan pembelajaran. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penyelenggaraan Program MBG yang efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran agar manfaat yang dihasilkan sebanding dengan besarnya anggaran yang dialokasikan.

Gambar 7
Aspek yang Kurang Disukai Penerima Manfaat Program MBG



Sumber: Data Sekunder, 2026

Hasil survei KPAI menunjukkan bahwa rasa dan kualitas makanan (52%) menjadi aspek yang paling banyak dikeluhkan oleh penerima manfaat, diikuti kesesuaian menu (33,5%), jadwal makan (22,1%), dan cara penyajian makanan (13,5%). Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola penyelenggaraannya. Temuan ini menjadi dasar penting untuk mengevaluasi penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis serta merumuskan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan efektivitas, kualitas, dan keberlanjutan program.

C. Deskripsi Masalah

1. Penggunaan Anggaran yang Belum Optimal

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas nasional yang pada tahun 2026 didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp 223 triliun yang berasal dari sektor pendidikan atau sekitar 83,4% dari total anggaran program. Besarnya alokasi anggaran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, hasil penelitian di Kota Makassar menunjukkan bahwa besarnya anggaran belum sepenuhnya diikuti oleh kualitas pelaksanaan program. Masih ditemukan kendala seperti keterlambatan distribusi makanan, variasi menu yang belum optimal, serta kualitas penyajian yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, efisiensi penggunaan anggaran tidak hanya berorientasi pada penghematan biaya, tetapi juga harus mampu menjamin tersedianya makanan bergizi yang aman, bermutu, dan sesuai dengan tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis.

2. Kualitas dan Variasi Menu Makanan Perlu Ditingkatkan

Program Makan Bergizi Gratis di Kota Makassar telah menyediakan makanan yang terdiri atas sumber karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayuran, serta buah-buahan sesuai dengan kebutuhan gizi penerima manfaat. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti tingkat kematangan makanan, kualitas kesegaran buah, serta variasi menu yang belum sepenuhnya mampu meningkatkan minat konsumsi penerima manfaat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya kandungan gizi, tetapi juga

oleh kualitas penyajian dan tingkat penerimaan makanan oleh kelompok sasaran. Variasi menu yang lebih beragam dan kualitas makanan yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan daya terima sehingga tujuan pemenuhan gizi dapat tercapai secara lebih optimal.

3. Pengawasan Keamanan Pangan yang Belum Maksimal

Keamanan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis karena berkaitan langsung dengan kesehatan penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap keamanan pangan masih memerlukan penguatan, terutama dalam penerapan standar higiene sanitasi, pengelolaan limbah, kebersihan dapur, serta penyimpanan bahan pangan sesuai standar yang berlaku.

Belum optimalnya pengawasan dapat meningkatkan risiko penurunan mutu makanan yang diterima oleh penerima manfaat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap seluruh proses penyediaan makanan, mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan, hingga pendistribusian, perlu dilakukan secara konsisten agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga.

D. Rekomendasi Kebijakan

1. Optimalisasi Pemanfaatan Fasilitas Pangan yang Telah Tersedia

Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mengutamakan pemanfaatan fasilitas pangan yang telah tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum, atau fasilitas pengolahan pangan lainnya yang telah memenuhi standar kemanan pangan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru tidak selalu menjadi pilihan utama sehingga penggunaan

anggaran dapat lebih efisien. Anggaran yang tersedia selanjutnya dapat dialihkan untuk meningkatkan kualitas bahan pangan, memperkuat sistem distribusi, memperbaiki sarana pendukung, serta meningkatkan pengawasan terhadap mutu makanan agar manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat dirasakan secara lebih optimal.

2. **Peningkatan Kualitas dan Variasi Menu Makanan**

   Perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan menu makanan secara berkala dengan tetap memperhatikan standar kecukupan gizi, kualitas bahan pangan, serta variasi menu yang lebih beragam dengan tetap mengacu pada standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang telah ditetapkan. Penyusunan menu juga perlu mempertimbangkan karakteristik penerima manfaat, ketersediaan bahan pangan lokal, serta tingkat penerimaan makanan oleh peserta didik tanpa mengurangi nilai gizi yang harus dipenuhi. Selain itu, pengawasan terhadap kualitas bahan pangan, tingkat kematangan makanan, dan kesegaran buah perlu dilakukan secara konsisten agar makanan yang disajikan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memiliki daya tarik sehingga dapat dikonsumsi secara optimal oleh penerima manfaat.

3. **Penguatan Pengawasan Keamanan Pangan**

   Pengawasan terhadap keamanan pangan perlu diperkuat pada seluruh tahapan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian makanan. Selain itu, penerapan standar higiene dan sanitasi, pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta pembinaan secara berkala kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu terus dilakukan guna menjamin

keamanan dan kualitas makanan yang diterima oleh penerima manfaat.

E. Daftar Pustaka

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2025 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.

Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Solichah, M. (2025). 52% Anak Indonesia Tidak Suka Rasa dan Kualitas Makanan dari MBG.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.

F. Output Policy Brief



RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi peserta didik dan kelompok rentan sebagai upaya mendukung te terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Program ini diselenggarakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Program MBG di Kota Makassar masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain pemanfaatan anggaran yang belum optimal, kualitas dan variasi menu makanan yang masih perlu ditingkatkan, serta pengawasan keamanan pangan yang belum maksimal. Permasalahan tersebut perlu segera mendapat perhatian mengingat Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional dengan dukungan anggaran yang besar serta berperan penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Apabila berbagai kendala tersebut tidak segera diatasi, efektivitas program dan manfaat yang diterima oleh peserta didik maupun kelompok rentan berpotensi tidak tercapai secara optimal.

Sebagai solusi, direkomendasikan tiga langkah strategis, yaitu optimalisasi pemanfaatan fasilitas pangan yang telah tersedia, peningkatan kualitas dan variasi menu makanan, serta penguatan pengawasan keamanan pangan. Pelaksanaan rekomendasi tersebut memerlukan peran Badan Gizi Nasional sebagai penanggung jawab utama, dengan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) sebagai koordinator di daerah yang berkoordinasi dengan SPPG, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan fasilitas kesehatan untuk memastikan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis berjalan secara efektif, berkualitas, aman, dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Masalah gizi pada peserta didik dan kelompok rentan, seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, masih menjadi tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Pemenuhan gizi yang memadai berperan penting dalam mendukung pertumbuhan, perkembangan fisik dan kognitif, serta meningkatkan kualitas kesehatan dan proses pembelajaran. Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menyelenggarakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional untuk meningkatkan status gizi masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Program ini diselenggarakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Komitmen terhadap penyelenggaraan Program MBG tercermin dalam APBN Tahun 2026 melalui alokasi anggaran sekitar Rp223 triliun kepada Badan Gizi Nasional yang bersumber dari anggaran pendidikan sebesar Rp769 triliun, sesuai amanat Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan alokasi sekurang-kurangnya 20% APBN untuk fungsi pendidikan. Besarnya alokasi tersebut menunjukkan bahwa MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang memperoleh dukungan anggaran yang signifikan. Di sisi lain, penggunaan sebagian anggaran pendidikan untuk Program MBG juga menimbulkan perhatian karena dinilai berpotensi mengurangi alokasi bagi peningkatan mutu pendidikan, seperti penyediaan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kompetensi guru, serta pengembangan layanan pembelajaran. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penyelenggaraan Program MBG yang efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran agar manfaat yang dihasilkan sebanding dengan besarnya anggaran yang dialokasikan.



Hasil survei KPAI menunjukkan bahwa rasa dan kualitas makanan (52%) menjadi aspek yang paling banyak dikeluhkan oleh penerima manfaat, diikuti kesesuaian menu (33,5%), jadwal makan (22,1%), dan cara penyajian makanan (13,5%). Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola penyelenggaraannya. Temuan ini menjadi dasar penting untuk mengevaluasi penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis serta merumuskan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan efektivitas, kualitas, dan keberlanjutan program.

DESKRIPSI MASALAH

1. Penggunaan Anggaran yang Belum Optimal

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas nasional yang pada tahun 2026 didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp 223 triliun yang berasal dari sektor pendidikan atau sekitar 83,4% dari total anggaran program. Besarnya alokasi anggaran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, hasil penelitian di Kota Makassar menunjukkan bahwa besarnya anggaran belum sepenuhnya diikuti oleh kualitas pelaksanaan program. Masih ditemukan kendala seperti keterlambatan distribusi makanan, variasi menu yang belum optimal, serta kualitas penyajian yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, efisiensi penggunaan anggaran tidak hanya berorientasi pada penghematan biaya, tetapi juga harus mampu menjamin tersedianya makanan bergizi yang aman, bermutu, dan sesuai dengan tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis.

2. Kualitas dan Variasi Menu Makanan Perlu Ditingkatkan

Program Makan Bergizi Gratis di Kota Makassar telah menyediakan makanan yang terdiri atas sumber karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayuran, serta buah-buahan sesuai dengan kebutuhan gizi penerima manfaat. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti tingkat kematangan makanan, kualitas kesegaran buah, serta variasi menu yang belum sepenuhnya mampu meningkatkan minat konsumsi penerima manfaat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya kandungan gizi, tetapi juga oleh kualitas penyajian dan tingkat penerimaan makanan oleh kelompok sasaran. Variasi menu yang lebih beragam dan kualitas makanan yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan daya terima sehingga tujuan pemenuhan gizi dapat tercapai secara lebih optimal.

3. Pengawasan Keamanan Pangan yang Belum Maksimal

Keamanan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis karena berkaitan langsung dengan kesehatan penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap keamanan pangan masih memerlukan penguatan, terutama dalam penerapan standar higiene sanitasi, pengelolaan limbah, kebersihan dapur, serta penyimpanan bahan pangan sesuai standar yang berlaku. Belum optimalnya pengawasan dapat meningkatkan risiko penurunan mutu makanan yang diterima oleh penerima manfaat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap seluruh proses penyediaan makanan, mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan, hingga pendistribusian, perlu dilakukan secara konsisten agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga.





03



REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Optimalisasi Pemanfaatan Fasilitas Pangan yang Telah Tersedia

Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mengutamakan pemanfaatan fasilitas pangan yang telah tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum, atau fasilitas pengolahan pangan lainnya yang telah memenuhi standar kemanan pangan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru tidak selalu menjadi pilihan utama sehingga penggunaan anggaran dapat lebih efisien. Anggaran yang tersedia selanjutnya dapat dialihkan untuk meningkatkan kualitas bahan pangan, memperkuat sistem distribusi, memperbaiki sarana pendukung, serta meningkatkan pengawasan terhadap mutu makanan agar manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat dirasakan secara lebih optimal.

2. Peningkatan Kualitas dan Variasi Menu Makanan

Perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan menu makanan secara berkala dengan tetap memperhatikan standar kecukupan gizi, kualitas bahan pangan, serta variasi menu yang lebih beragam dengan tetap mengacu pada standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang telah ditetapkan. Penyusunan menu juga perlu mempertimbangkan karakteristik penerima manfaat, ketersediaan bahan pangan lokal, serta tingkat penerimaan makanan oleh peserta didik tanpa mengurangi nilai gizi yang harus dipenuhi. Selain itu, pengawasan terhadap kualitas bahan pangan, tingkat kematangan makanan, dan kesegaran buah perlu dilakukan secara konsisten agar makanan yang disajikan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memiliki daya tarik sehingga dapat dikonsumsi secara optimal oleh penerima manfaat.

3. Penguatan Pengawasan Keamanan Pangan

Pengawasan terhadap keamanan pangan perlu diperkuat pada seluruh tahapan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian makanan. Selain itu, penerapan standar higiene dan sanitasi, pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta pembinaan secara berkala kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu terus dilakukan guna menjamin keamanan dan kualitas makanan yang diterima oleh penerima manfaat.



04

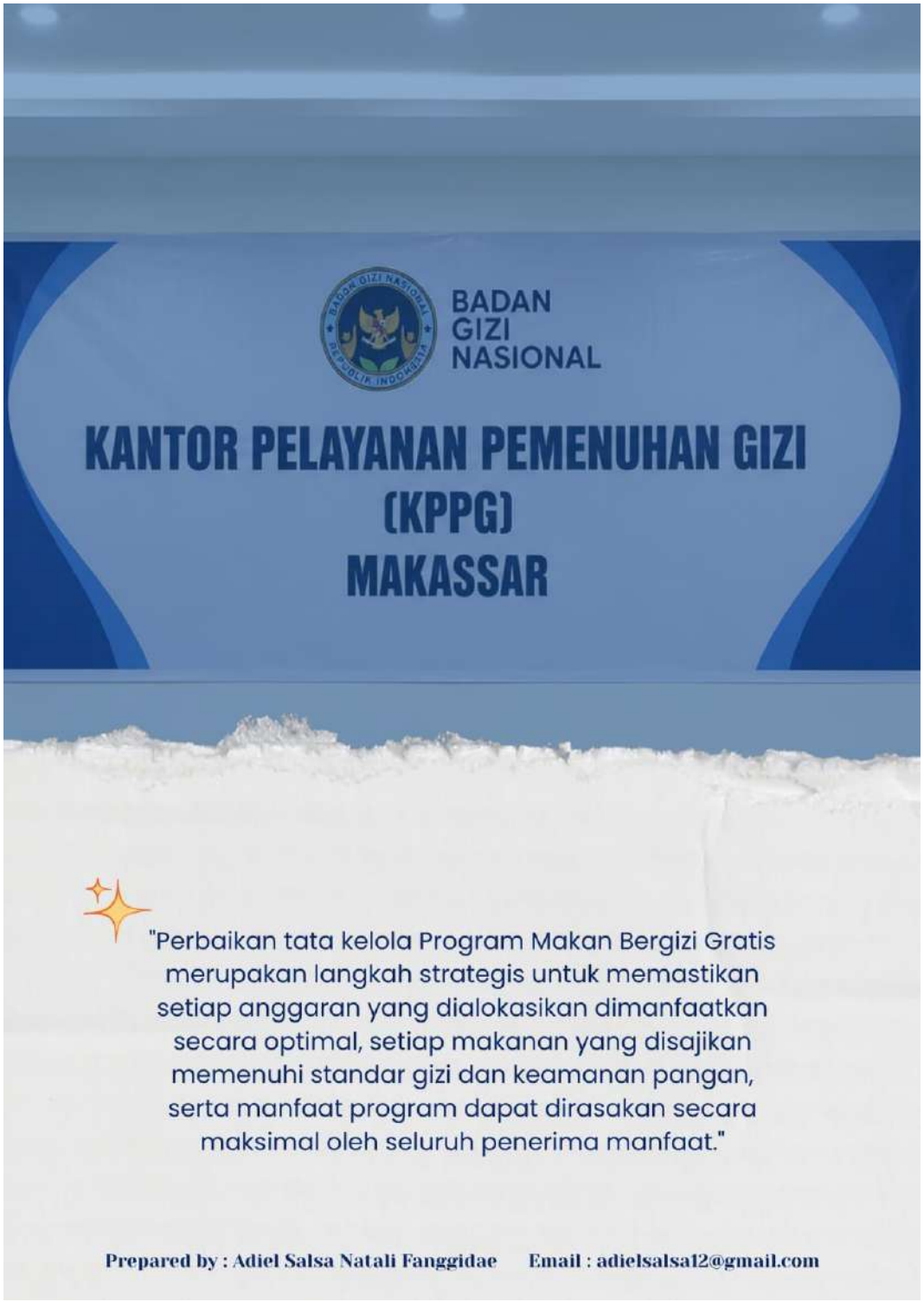
REFERENSI

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2025 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.

Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Solichah, M. (2025). 52% Anak Indonesia Tidak Suka Rasa dan Kualitas Makanan dari MBG.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.


BADAN
GIZI
NASIONAL
KANTOR PELAYANAN PEMENUHAN GIZI
(KPPG)
MAKASSAR
"Perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan dimanfaatkan secara optimal, setiap makanan yang disajikan memenuhi standar gizi dan keamanan pangan, serta manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh penerima manfaat."
Prepared by : Adiel Salsa Natali Fanggidae
Email : adielsalsa12@gmail.com